

Assistance in Preparing Gender Responsive Village Budgets Towards Good Village Governance

Pendampingan Penyusunan Anggaran Desa Responsif Gender Menuju Good Village Governance

Mustiqowati Ummul Fithriyyah¹, Zulhaida²

^{1,2}, UIN Sultan Syarif Kaim Riau

*e-mail: mustiqowati@uin-suska.ac.id¹, zulhaida@uin-suska.ac.id²

Abstract

This research-based community service aims to provide assistance to village officials in the preparation of gender-responsive village budgets. This assistance is intended to provide understanding to the village community and especially to village government officials so that village funds can be used to develop gender-responsive village development programs. Gender responsive village budgets are a pillar in disseminating ideas that lead to improved village governance. This community service uses an Asset-based community development (ABCD) approach that emphasizes the assets and potential owned by Wonosari village, Rangsang district, MeraSSnti Islands regency. One of the things that is seen as an asset is the involvement of women in strategic positions as village government officials who handle village finances. In addition, the head of her village has had a gender justice perspective. The result of this community service is the achievement of changes in the understanding of village officials who already have a good understanding of gender response budgets.

Keywords: Village Budget, Gender Responsive, Good Village Governance

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada para aparatur desa dalam penyusunan anggaran desa yang responsive gender. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa dan khususnya kepada aparatur pemerintah desa agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembangunan desa yang responsive gender. Anggaran desa yang responsive gender merupakan pilar dalam menyebarkan gagasan yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset-based community development (ABCD) yang menekankan pada asset dan potensi yang dimiliki oleh desa Wonosari kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu hal yang dipandang sebagai asset adalah keterlibatan perempuan dalam posisi strategis sebagai aparatur pemerintah desa yang menangani keuangan desa. Selain itu, kepala desanya telah memiliki perspektif keadilan gender. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah tercapainya perubahan pemahaman aparatur desa yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang anggarannya responsof gender.

Kata Kunci: Anggaran Desa, Responsif Gender, Good Village Governance

1. PENDAHULUAN

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa di Indonesia adalah sebuah upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan desa yang menjadi instrumen dalam rencana pembangunan desa yang menyeluruh serta adil gender. Hal ini dikarenakan ketidakadilan gender dalam pembangunan menjadi dampak dari model pembangunan yang eksklusif. Sampai saat ini masih banyak ditemui dalam proses penataan rencana pembangunan desa yang hanya mengaitkan tokoh- tokoh kunci ataupun wakil kelompok warga tertentu saja yang umumnya menonjol dalam komunitas serta cenderung kokoh letaknya.

Di antara area tata kelola pemerintahan desa adalah penyelenggaraan dana desa, yaitu system keuangan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada desa. Dana ini, biasanya dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten ataupun kota. Pada tahun 2018, setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp.800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp.933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp.960,6 juta. Di tahun 2020, pemerintah menyediakan dana sekitar Rp.72 triliun untuk pemerintahan desa yang berjumlah 74.953 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana ini, kemudian disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Secara proyektif, dana ini selanjutnya dipakai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan warga desa, tanpa memandang suku, etnis, agama, dan gender.

Perihal ini pula dimaksudkan supaya tercapai efisiensi serta daya guna pemakaian anggaran dan diskriminasi terhadap wanita dalam pembangunan desa demi terwujudnya *Good Village Governance* ataupun tata kelola pemerintahan desa yang baik. Peranan Pemerintah desa dalam melakukan *Good Village Governance* merupakan penerapan dari tugas guna kewenangan hak serta kewajiban yang dipunyai Pemerintah desa dalam perencanaan, penerapan pembangunan desa. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) meliputi:

- (1) Akuntabilitas (*accountability*) yang dimaksud selaku kewajiban buat mempertanggungjawabkan kinerja;
- (2) Keterbukaan serta transparansi (*openness and transparency*) dalam makna warga tidak cuma bisa mengakses sesuatu kebijakan namun pula turut berfungsi dalam proses formulasi;
- (3) Partisipasi warga dalam bermacam aktivitas pemerintah yang *universal* serta pembangunan.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) adalah sebuah keharusan terutama dalam penganggaran dana desa yang responsif gender. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti yang di katakan relatif masih tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten lain di Indonesia dan termasuk ke dalam daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Riau dengan angka kemiskinan mencapai 25,28 % di tahun 2020 (<https://kemendes.go.id>). Ketertinggalan ini juga dapat dilihat dari hasil evaluasi yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Indeks/GDI*). Indeks ini, adalah instrument untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Sekaligus juga menjadi media untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Meranti, masih berada di angka 89,17. Angka ini, tentu saja masih jauh dari rata-rata yang menjadi pencapaian nasional, yaitu sebesar 92.74. Dengan demikian, telah terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di Kabupaten Meranti.

Tepatnya di salah satu Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yaitu Desa Wonosari Kecamatan Rangsang yang mempunyai potensi untuk penganggaran dana desa yang responsif gender untuk mendukung Kabupaten Kepulauan Meranti bangkit dari ketertinggalan. Kepala desa wonosari saat ini adalah seorang difabel dan kaur keuangannya adalah seorang perempuan. Ini menjadi potensi yang sangat baik untuk pembentukan anggaran desa yang responsif gender dengan memastikan masyarakat (Laki-Laki, Perempuan, Disabilitas, Miskin, Marjinal) memperoleh hak dan kewajiban yang setara baik dalam akses, partisipasi, control dan manfaat.

Tabel 1. Program Afirmasi Gender Desa Wonosari 2021

No	Belanja	Nominal
1	Paud	Rp. 58.013.071
2	Posyandu	Rp. 38.150.000
3	Stunting	Rp. 24.976.000
4	Pembinaan PKK	Rp. 2.000.000
5	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 9.370.000
6	Santunan Yatim Piyatu	Rp. 8.813.086

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran desa Wonosari Kecamatan Rangsang memiliki potensi untuk kesetaraan gender. Program-program yang termasuk ke dalam anggaran desa itu haruslah dari aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, sehingga akan terciptanya keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada. Berdasarkan data BPS Kecamatan Rangsang 2020, jumlah perangkat desa/kelurahan (termasuk kades/lurah) di Desa Wonosari belum responsif gender. Dengan data laki-laki berjumlah 9 (sembilan) orang dan perempuan hanya berjumlah 2 (dua) orang. Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam pemerintah desa masih sangat minim.

Dari uraian di atas, maka tujuan kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembangunan desa dalam memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjadikan Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai desa yang memiliki proses pelaksanaan perencanaan anggaran yang responsif gender sebagai upaya untuk mewujudkan *good village governance* atau tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. METODOLOGI

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset-based community development* (ABCD) yang dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk pengabdian masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pilihan ini, didasarkan oleh argumentasi bahwa pendekatan ABCD adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dengan asumsi masyarakat sendiri sudah memiliki modal atau asset untuk dikembangkan, sehingga warga masyarakat akan menjadi pelaku dan penentu dalam mewujudkan sebuah tatanan social yang adil dan merata. Dalam konteks ini, model ini sering disebut dengan *Community-Driven Development* (CDD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Penyusunan Anggaran Desa Yang Responsif Gender Menuju Good Village Governance Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten kepulauan meranti adalah salah satu daerah 3T. salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti ini yaitu pulau Rangsang mendapat sertifikat hak atas tanah sebagai salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2017 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PRL. Pulau Rangsang yang terletak di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki luas 867,86 Km² dengan kondisi pulau terdiri dari hutan belukar, perkampungan, ladang perkebunan dan tanah terbuka. Pulau-pulau terluar ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar pesisir. Pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun stakeholder lainnya di mulai dari unit yang paling kecil di tatanan pemerintah yaitu desa. Salah satu desa di Kecamatan Rangsang adalah Desa Wonosari.

Pasca tahun 2000, yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 9/2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka semua satuan kerja di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran, harus berbasis pada responsive gender. Intruksi ini, menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai lini pemerintahan negeri ini. Strategi pengarusutamaan gender ini, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, lalu mendorong kebijakan sebagai berikut;

Pertama, meningkatkan peran perempuan dalam setiap lini pembangunan di Indonesia. Juga memberikan ruang bagi terwujudnya kualitas hidup kaum perempuan dalam setiap jenjang kehidupan mereka, melalui proses harmonisasi dan perubahan perundang-undangan di semua tingkat pemerintahan dengan mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan; *Kedua*, memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dari ragam perilaku kekerasan dan pelecehan seksual. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan, pemberian layanan, dan pemberdayaan; dan *Ketiga*, melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan bagi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan.

Upaya tersebut, akan menjadi utopia jika tidak ditunjang oleh system dan kemauan yang kuat dari semua pihak, terutama kemauan politik (*political will*) dari pimpinan-pimpinan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Setidaknya, terdapat lima prasyarat yang mampu memberikan jaminan atas terlaksananya PUG ini, di antaranya adalah; *Pertama*, dukungan politik yang kuat; *kedua*, adanya kebijakan atau program atau kegiatan yang mendorong munculnya kesetaraan dan responsive gender; *ketiga*, secara kelembagaan, penguatan tentang PUG didukung oleh semua pihak, sehingga ia menjadi lembaga yang kuat untuk menjalankan PUG; *keempat*, adanya data dan informasi terpilah, yang secara jenis kelamin tergambar dengan jelas; dan *kelima*, adanya kemampuan Sumber Daya Manusia yang kuat dalam menjalankan dan mengawal PUG.

Indikasi bahwa kebijakan PUG ini kuat didukung secara politik, dapat ditelusuri melalui sejauhmana ketersediaan peraturan dan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan politik ini, terkadang dapat diperoleh melalui proses yang mampu memberikan pemahaman bagi para pengambil kebijakan. Untuk dapat memberikan pemahaman yang baik bagi para pengambil kebijakan, terkait dengan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka kegiatan sosialisasi, training, workshop dan kegiatan-kegiatan lain tentang perencanaan anggaran yang responsive gender, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Program pengarusutamaan Gender (PUG) ini, pada hakikatnya merupakan manifestasi dari intruksi presiden Nomor 9/2000 yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesemuanya, semestinya memiliki kesadaran yang baik, untuk menjalankan pengarusutamaan gender ini. Dari intruksi Presiden itu juga, kita dapat memahami bahwa pelaksanaan PUG itu, diarahkan untuk memberikan kesediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain sesuai dengan perundang-undangan.

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Pelatihan Penyusunan Anggaran Desa Yang Responsif Gender Menuju Good Village Governance Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pelatihan Penyusunan Anggaran Desa Yang Responsif Gender Menuju Good Village Governance Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti” dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 sd Minggu 26 Juni 2022 di Aula Kantor Desa Wonosari. Pengabdian ini diawali dengan analisis situasi mengenai isu gender dalam perencanaan anggaran yang responsif gender dalam upaya mewujudkan good village governance di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan oleh Ketua dan Tim Pengabdian UIN Suska Riau. Hasil analisis menunjukkan bahwa Desa Wonosari mempunyai asset atau peluang untuk menjadi desa yang responsive gender dilihat dari struktur aparatur desa yang sudah melibatkan peran aktif dari para perempuan. Analisis situasi ini dilakukan pada bulan Februari s.d April dengan memperhatikan secara seksama keadaan real dilapangan.

Tim pengabdian mengadakan survey dan ramah tamah dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan beberapa aparatur Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan pada tanggal 11 s/d 12 Juni 2022. Ketua dan Tim pengabdian turun langsung untuk melakukan pra survey penelitian. selanjutnya mengidentifikasi permasalahan real dari hasil pertemuan antara aparatur desa untuk membuat formulasi pelatihan penyusunan anggaran desa yang responsive gender.

Hasil indentifikasi menunjukkan bahwa Aparatur Desa Wonosari perlu diberikan materi yaitu Konsep Pembangunan Desa; Pengenalan Gender; Pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa; Good Village Governance; Anggaran Desa Responsif Gender; Tehnik Pembuatan Anggaran Desa Responsif Gender; serta Pendampingan dalam merumuskan penyusunan anggaran desa yang responsif gender.

Pada saat survey, Bapak Zaeni selaku Kepala Desa Wonosari sangat mendukung, antusias dan siap untuk mengerahkan para aparatur desa nya agar mengikuti pelatihan penyusunan anggaran desa yang responsif gender ini. Bapak Zaeni memaparkan bahwa

“ Kami sangat senang dan antusias sekali untuk mengikuti pelatihan penyusunan anggaran desa yang responsif gender dalam mewujudkan good village governance di Desa kami, sebab ini merupakan suatu kebutuhan bagi setiap desa-desa di Kecamatan Rangsang bahkan di seluruh Indonesia untuk mengetahui cara dan tehnik dalam membuat suatu anggaran yang adil bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, segala usia dan untuk kepentingan difabel juga. Kami dari pihak desa siap untuk mengikuti pelatihan dengan seksama dan akan mempraktekkan ilmu yang kami dapat dari pelatihan nanti”

Paparan dari Kepala Desa Wonosari di atas menjadi penyemangat bagi tim pengabdian untuk melakukan dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelatihan yang mudah dipahami. Dengan ini tim pengabdian bekerja sama dengan Forum Indonesia Untuk Transpransi Anggara (FITRA), Institute for Research and Development (IRDEV), Fasilitator Program Kolaborasi Biro SDM Kemenkeu untuk memberikan materi yang berkaitan tentang penyusunan anggaran desa responsif gender dalam mewujudkan Good Village Governance. Setelah materi, narasumber dan waktu di tentukan, maka ketua dan tim pengabdian UIN Suska Riau turun untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2022.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Anggaran Desa Responsif Gender

Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berjalan dengan baik. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian aparatur desa dapat mencapai perubahan pemahaman, dari yang tidak mengetahui sama sekali tentang anggaran responsif gender menjadi lebih memahami tentang anggaran responsof gender dan sekaligus penyusunannya.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penganggaran dana desa di desa Wonosari kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti masih belum responsif gender. Hal ini berdampak pada perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan terhadap masyarakat. Perempuan dinyatakan memiliki keterlibatan dan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran di desa wonosari, namun meskipun demikian, belum didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai terkait perencanaan anggaran yang responsif gender. di sisi lain, alokasi anggaran yang ditetapkan belum mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan secara merata. selain itu, belum terdapat akses yang setara dalam penyusunan anggaran untuk kegiatan pembangunan, dan dalam aspek manfaat, perempuan dan laki-laki belum menerima dengan setara.

Secara keseluruhan penerapan penganggaran dana desa yang belum responsive gender akan menghambat terciptanya *good village governance*. Hal ini berdasarkan tiga indikator yang mempengaruhi terciptanya *good governance* yaitu:

1. Transparansi, keterbukaan informasi pada pemerintahan dilaksanakan dengan tidak transparan terhadap masyarakat desa.
2. Akuntabilitas, tanggungjawab pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan belum akuntabel dan kurang optimal.
3. Partisipasi masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dikatakan masih sangat apatis dalam setiap pelaksanaan perencanaan anggaran dana desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi bantuan dana kepada tim pengabdian, sehingga dapat terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan berdampak bagi perubahan yang lebih baik pada terwujudnya *good village governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Akbar, M. A. (2018). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 1-17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21626>
- Alwindria, Y., Taufik, T., & Azlina., N. (2019). Analisis Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, Vol. 3 no. 2, 259-282.
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*. Volume 3 Nomor 1, 1-17.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 Nomor 1, 1-7.
- Bandiyah. 2018. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMD Berbasis Prokemiskinan dan Berkeadilan Gender di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Bali. Vol 2 No 1 Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Doi: <https://doi.org/10.25170/mitra.v2i1.28>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, Vol. 03 No. 02.
- Febryani, H. (2016). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Habluminallah, Habliluminnas Dan Hablumminal'alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Nanben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur). Vol.6 Nomor 1, 12-20.
- Fatur Rohmah, N. (2018). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2 Nomor 1, 1-11.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Gainau, Paskanova Christi. 2022. Does Local Government Budgeting Accommodate Gender Equality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 13, Nomor 1, Halaman 128-142, ISSN 2086-7603, <http://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.10>
- Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. (2019). Gender-Responsif Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 27. <https://doi.org/10.34309/jp.v24i1.308>
- Hardiwinoto. (2017). *Good Governance Government. Clean Good Government*.
- Muhammad Syukur, Firdaus W.Suhaeb, Nurlela. 2022. Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance. *JPKMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*. Vol.2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 125-132.
- Nair, Nisha Velappan and John S. Moolakkatu. 2018. Gender-Responsive Budgeting The Case of a Rural Local Body in Kerala. *Sage Open*, January-March 2018: 1-14, Doi: [10.1177/2158244017751572](https://doi.org/10.1177/2158244017751572), journals.sagepub.com/home/sgo

- Koesriwulandari, Koesriwulandari. 2015. "Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 15(2): 68-77.
- Ife, Jim & Frank Tesoriero, 2008. *Community Development: Alternative Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noviana, Ivo. (2010). *Participatory Action Research: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjadikan Lingkungan Yang Bebas Narkoba (Studi Kasus di Kompleks Permata, Jakarta Barat)*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15 (3), 208 -218.
- Nurkholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 9(1), 13-26.